PERAN PENTING TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh

Kadek Dedy Suryana, SH, MH

**Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(dedy.pinguinfm@gmail.com**

Abstrak, Maraknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sangat menjadi momok dan tugas berat pemerintah untuk memberantasnya satu persatu. Awalnya korupsi masih dilakukan dalam bentuk suap secara kecil-kecilan, namun sekarang korupsi dilakukan dalam kategori miliaran dari segala aspek, bahkan kasus terakhir adalah terkuak sampai ke rumah tahanan. Suatu fenomena tragis karena bangsa Indonesia kita dikenal memiliki moralitas yang berbudaya tinggi dan masyarakatnya teramat religius. Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dengan memangkas yang terlihat saja. Melainkan harus dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan lebih baik. Tujuan akhirnya tidak hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat itu sendiri, melainkan juga memunculkan tatanan sosial baru yang bebas korupsi. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimanakah peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia?. masyarakat serta dorongan dari masyarakat akan sadar korupsi harus benar-benar ditingkatkan, termasuk kerjasama dari KPK dengan selalu memberikan penyuluhan bersama tokoh masyarakat, karena karena tokoh masyarakat ini merupakan ujung tombak penting untuk menggerakkan system masyarakat sadar korupsi. Sebagai saran, KPK bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan adat dalam pembentukan aturan dalam masyarakat, misalnya awig-awig dalam masyarakat adat Bali. Dengan adanya awig-awig yang mengatur tentang korupsi setindak menjadi landasan dalam penegakan anti-korupsi ini sendiri yang dimulai tingkat kelompok masyarakat adat.

Kata Kunci, Korupsi, Peran Masyarakat

Abstract, *The rise of corruption cases revealed lately shows that corruption crime in Indonesia is very much a scourge and the heavy duty of the government to eradicate it one by one. Initially corruption was still carried out in the form of petty bribes, but now corruption is carried out in the category of billions from all aspects, even the last case was revealed to the detention center. It is a tragic phenomenon because our nation is known to have a high cultural morality and a very religious community. Efforts to eradicate corruption cannot be cut off by what is seen. But must be with broad and deep social movements, leading to social and cultural change. The social movement to eradicate corruption is a revival of society to jointly correct conditions and bring a better life. The ultimate goal is not only to change the attitudes and behavior of individuals within the community itself, but also to bring about a new social order that is free of corruption. The problem in this journal is how the role of community leaders becomes very important in the process of eradicating corruption in Indonesia. the community and the encouragement of the community to be aware of corruption must be truly enhanced, including cooperation from the KPK by always providing counseling with community leaders, because because these community leaders are the important spearhead for moving a corruption-aware community system. As a suggestion, the KPK cooperates with community and adat leaders in the formation of rules in the community, for example awig-awig in the Balinese indigenous community. With the awig-awig regulating corruption, it will act as a foundation in the enforcement of anti-corruption itself, which was started at the level of indigenous groups.*

Keywords, Corruption, Community Role

Pendahuluan

Maraknya kasus korupsi yang terungkap akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sangat menjadi momok dan tugas berat pemerintah untuk memberantasnya satu persatu. Awalnya korupsi masih dilakukan dalam bentuk suap secara kecil-kecilan, namun sekarang korupsi dilakukan dalam kategori miliaran dari segala aspek, bahkan kasus terakhir adalah terkuak sampai ke rumah tahanan. Suatu fenomena tragis karena bangsa Indonesia kita dikenal memiliki moralitas yang berbudaya tinggi dan masyarakatnya teramat religius.

Berbagai bentuk kejahatan korupsi dapat kategorikan sebagai kejahatan yang merugikan negara, baik dalam bentuk aktif yaitu hilangnya keuangan maupun asset negara dan dalam bentuk pasif yaitu hilangnya pendapatan negara yang semestinya diterima oleh negara, sehingga pada akhirnya mengakibatkan terpuruknya ekonomi nasional yang menyengsarakan kehidupan rakyat banyak, selain juga merusak tata nilai moral bangsa yang apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasannya akan menghancurkan kehidupan bangsa dari generasi ke generasi, maka sudah saatnya kondisi yang memprihatinkan bangsa ini mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan penyelenggara negara, juga keikutsertaan segenap lapisan masyarakat dalam pemberantasan korupsi

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Good Governance).⁵⁷

Korupsi secara genealogis ternyata sudah dikenal sejak jaman raja-raja dengan budaya pemberian upeti sebagai tanda penghormatan dan ungkapan terimakasih, juga tentunya terselubung tujuan untuk memperoleh “kebaikan-kebaikan” atau hak tertentu yang menjadi timbal balik. Demikian pula di Indonesia, korupsi yang pada awalnya hanya dilakukan oleh masyarakat berupa suap terhadap pejabat untuk memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan, dari urusan pembuatan identitas diri atau KTP, bahkan untuk memperlancar urusan bisnis misalnya, sampai urusan dalam berperkara untuk dimenangkan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, terus berkembang dengan melibatkan pejabat publik untuk mencuri keuangan negara melalui berbagai kejahatan dan kerjasama dengan anggota masyarakat atau berkolusi antar oknum penyelenggara negara yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, sebagaimana lazimnya dikenal sebagai “*White color crime*”. Jaringan kejahatan tersebut dilakukan secara nasional maupun transnasional sehingga meningkat pada bentuk kejahatan Money Laundering.⁵⁸

Pada saat era reformasi bergulir di pertengahan tahun 1998 masalah korupsi menjadi salah satu sajian topik menarik untuk diangkat ke permukaan. Hal ini senada dengan Satjipto Rahardjo, yang mengemukakan :

“Indonesia tengah berada di pusat gejolak besar yang disebut reformasi.

⁵⁷ Gayus Lumbuun, Artikel Jurnal Keadilan Vol.4, No.2, Tahun 2005/2006

⁵⁸ *Ibid*

Untuk mengoptimalkan reformasi, seyogianya kita memiliki kejernihan dan ketajaman konsep serta visi mengenai reformasi tersebut. Dewasa ini KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) sudah menjadi semacam trade mark reformasi. Untuk kebutuhan praktis dan jangka dekat itu baik-baik saja, tetapi tidak untuk tujuan dan cita-cita reformasi sebenarnya. Kita membutuhkan suatu landasan filosofis atau semacam weltenschaung, yang dapat memberikan kekayaan spiritual kepada reformasi kita.”⁵⁹

Usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara yuridis sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan dikeluarkannya peraturan pemberantasan korupsi; Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Republik Indonesia Nomor Prt/PM/06/1957 “sebagai dampak ketidakmampuan KUHP dalam menanggulangi meluasnya korupsi”.

Kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi oleh Pemerintah sejak awal 1970-an, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga dengan upaya pembinaan dari pejabat-pejabat telah ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat, baik yang dilakukan oleh intern departemen dan lembaga maupun secara ekstern oleh Menteri Aparatur Negara.⁶⁰

Upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dengan memangkas yang terlihat saja.

Melainkan harus dengan gerakan sosial yang luas dan mendalam, mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan lebih baik. Tujuan akhirnya tidak hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat itu sendiri, melainkan juga memunculkan tatanan sosial baru yang bebas korupsi.

Merubah tatanan sosial yang bebas korupsi di Indonesia merupakan proses pembangunan nasional yang terencana oleh pemerintah bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat Indonesia. Perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan bidang lainnya dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial. Pemerintah menjalankan program-program sebagai penjabaran kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat birokrasi pemerintah, didukung partisipasi masyarakat dan segenap unsur organisasi sosial termasuk tokoh masyarakat yang sangat berperan penting dalam perubahan ini. Partisipasi tokoh masyarakat sangat berpengaruh positif bagi peningkatan atau perbaikan kualitas hidup rakyat secara proporsional dan berkeadilan sosial, namun bagaimanakah peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia?

⁵⁹ Satjipto Rahadjo, “Kultur POLRI Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern”, Bandung hal.20

⁶⁰ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Jakarta hal.3

Pembahasan

Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama baik secara preventif maupun secara refresif, namun sampai saat orde reformasi masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil yang maksimal, meski demikian sudah banyak koruptor yang sudah menjalani hukuman maupun yang masih dalam proses di pengadilan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang tersebar diberbagai peraturan perundang undangan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi dan Kolosi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian uang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah korupsi juga sudah menjadi perhatian masyarakat dunia yang dituangkan melalui United Nation Convention Against Coruption (UNCAC). Pada tanggal 11 Desember Tahun 2003 di Merida, Mexico menandakan bahwa ada upaya bersama dari bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi korupsi, dan telah diratifikasi dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga hal ini menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global dalam memerangi korupsi.⁶¹

Sejumlah undang-undang yang sekalipun tidak terkait langsung dengan pemberantasan korupsi tetapi terkait dengan keuangan negara dan pengelolannya serta terkait dengan masalah penegakan hukum pada umumnya yang sudah barang tentu termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁶¹ Fathan Qorib, Rapor Biru Implementasi UNCAC Indonesia, 20 April 2011, www.hukumonline.com

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Republik
Indonesia.

Masing-masing undang-undang tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya sendiri-sendiri. Selain itu terkadang dalam peraturan perundang-undangan tersebut digunakan parameter, kriteria, pengertian yang berbeda satu sama lain yang terkait dengannya, sehingga semakin memperparah pemberantasan korupsi itu sendiri.

Korupsi dalam bahasa Latin disebut dengan *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- b. penggelapan dalam jabatan;
- c. pemerasan dalam jabatan;
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga terakhir dan satu satunya harapan untuk menegakkan hukum guna memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Komisi ini diberikan kewenangan dan tugas yang luar biasa, extra ordinary, bagi pemberantasan korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶² Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab

⁶² Wikipedia, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018

kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Meski demikian peran serta masyarakat terutama tokoh masyarakatlah yang sangat dibutuhkan KPK dalam memberantas korupsi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol mengatur bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

Untuk memahami dengan baik, siapa dan apa yang menyebabkan seseorang disebut sebagai tokoh masyarakat paling tidak disebabkan oleh lima hal yaitu:

Pertama, kiprahnya di masyarakat sehingga yang bersangkutan ditokohkan oleh masyarakat yang berada dilingkungannya. Dengan ketokohnya itu, maka masyarakat memilihnya untuk menduduki posisi-posisi penting di masyarakat mulai dari ketua RT, ketua RW, ketua organisasi kepemudaan, ketua masjid, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang berakar di masyarakat seperti kelian banjar, NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, termasuk tokoh agama, tokoh adat (jro bendesa), tokoh organisasi kedaerahan, tokoh lingkungan, tokoh dari suatu kawasan, tokoh

keturunan darah biru, tokoh pekerja, tokoh pergerakan dan lain-lain.

Kedua, memiliki kedudukan formal di pemerintahan seperti Lurah/Wakil Lurah, Camat/Wakil Camat, Walikota/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan lain-lain. Karena memiliki kedudukan, maka sering blusukan dan bersama masyarakat yang dipimpinnya. Ketokohnya menyebabkan dihormati, dipanuti, diikuti, diteladani oleh masyarakat. Pemimpin formal semacam ini, pada suatu waktu bisa disebut tokoh masyarakat, apakah masih memiliki jabatan/kedudukan atau sudah pensiun/tidak lagi memiliki kedudukan formal.

Ketiga, mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang tertentu atau dalam berbagai bidang sehingga masyarakat dan pemimpin pemerintahan dari tingkatan paling bawah – sampai ke atas selalu meminta pandangan dan nasihat kepadanya. Karena kepakarannya, maka yang bersangkutan diberi kedudukan dan penghormatan yang tinggi, kemudian disebut tokoh masyarakat. Keempat, ketua partai politik yang dekat masyarakat, rajin bersilaturahmi kepada masyarakat, menyediakan waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat, suka menolong masyarakat diminta atau tidak. Ketua partai politik seperti ini, dapat disebut sebagai tokoh masyarakat. Kelima, usahawan/pengusaha yang rendah hati, suka beramal, peduli kepada masyarakat, serta suka bersilaturahmi, pada umumnya masyarakat menyebut yang bersangkutan sebagai tokoh masyarakat.

Peran serta tokoh masyarakat inilah yang harus diperkuat oleh KPK, karena

banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat disebabkan tidak dipatuhinya berbagai peraturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sejatinya, suatu peraturan itu dibuat dengan tujuan agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan aman dan tertib. Untuk itu, setiap peraturan atau ketentuan selalu disertai dengan sanksi. Penerapan sanksi yang tegas oleh aparat merupakan wujud pengendalian sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Demi tercipta suatu tatanan hidup yang aman dan tertib, diperlukan suatu pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga yang ada dalam masyarakat. Pengendalian sosial adalah mekanisme yang dilakukan untuk mendidik, mengajak, atau memaksa masyarakat agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh lembaga resmi seperti kepolisian dan pengadilan. Namun yang paling penting adalah dilakukan oleh lembaga tidak resmi seperti adat dan tokoh masyarakat.

Pada masyarakat tradisional, lembaga pengendalian sosial dipegang oleh adat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling ideal berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma atau peraturan yang dipahami, diakui, dipelihara secara terus menerus oleh masyarakat dimana adat tersebut berada. Lembaga adat merupakan lembaga pengendalian sosial nonformal yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat yang ada. Jika ada warga masyarakat yang melanggar adat dimana ia berada, maka ia akan mendapat sanksi atau hukuman berupa teguran secara lisan, membayar denda,

dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat. Dalam adat, ketua adat berperan besar dalam pengendalian sosial. Seringkali, lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih kuat karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat melalui proses sosialisasi.

Sementara yang dijadikan sebagai tokoh masyarakat dalam suatu masyarakat adalah seseorang yang dianggap sebagai panutan, pemimpin, memiliki pengaruh yang besar, dan disegani. Tokoh masyarakat dapat bersifat formal misalnya kepala desa atau camat atau informal yang pada umumnya tokoh agama seperti kiai, ajengan, ulama, pendeta atau biksu dan jro bendesa untuk masyarakat adat Bali. Sebagai contoh, tokoh masyarakat di Aceh membentuk SAMAK atau Solidaritas Masyarakat Anti-Korupsi. SAMAK adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang independen, didirikan 3 November 1999, oleh aktivis Organisasi Non Pemerintah, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa, yang bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Visi SAMAK bertujuan agar terbangunnya gerakan sosial yang kuat dan berpengaruh untuk membebaskan Aceh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan misi SAMAK adalah melakukan penguatan partisipasi rakyat untuk terbentuknya gerakan anti korupsi, penguatan kapasitas organisasi SAMAK menjadi organisasi yang kuat dan efektif, serta mendorong terjadinya perubahan kebijakan yang transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa dalam hal pengkajian Sistem Hukum (legal system) dapat didekati dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan kultur (budaya). Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, komponen substansi merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai-nilai dan sikap-sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Komponen kultur (budaya) memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Adakalanya tingkat keberhasilan penegakan hukum pada suatu masyarakat tinggi karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (public participation) yang sangat tinggi pula dalam pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan terjadinya kejahatan di lingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu ditetapkan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau “modern” dalam kenyataannya tidak menghasilkan output

penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya : pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan melalui fungsi dari bekerjanya proses dan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat, yaitu sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan demikian, maka hukum akan menjadi wadah bagi penyaluran proses-proses dalam masyarakat, yang secara teoritis fungsi demikian itu dapat dilaksanakannya, baik dengan cara memberikan jalan agar proses-proses berjalan dengan tertib dan teratur, maupun untuk mengalmurkannya sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan.

Sebagaimana kejahatan pada umumnya, korupsi dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, dilakukan baik oleh kalangan elit di pusat dan daerah, maupun oleh kalangan bawah atau pegawai, seperti : dalam pembuatan KTP, SIM dan berbagai macam perizinan. Korupsi menggerogoti kehidupan masyarakat terutama rakyat kecil yang menanggung beban ekonomi biaya tinggi, dan melambungnya harga barang-barang kebutuhan pokok ditengah sulitnya kehidupan.

Menurut Syed Hussein Alatas, yang dikutip dari Aprillani Arsyad ⁶³faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi

⁶³ Aprillani Arsyad, Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

kunci yang mampu memberikan ilham dan tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.
- c. Kolonialisme, suatu pemerintah asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tiadanya tindakan hukum yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
- h. Struktur pemerintahan.
- i. Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- j. Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.

Dari berbagai faktor penyebab korupsi tersebut, sangat erat kaitannya dengan aspek budaya (hukum), maka perlu suatu gerakan membudayakan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi di tengah masyarakat Indonesia, sehingga akan menjadi motor penggerak bagi bekerjanya hukum. Seperti dikemukakan Satjipto Kahardjo dengan mengutip Friedman, bahwa nilai-nilai dan sikap-sikap ini dianggap semacam bensin yang akan menggerakkan motor tatanan hukum yang ada, bahwa tanpa motor penggerak ini maka pranata hukum itu akan menjadi lembaga yang mati belaka. Unsur

nilai-nilai dan sikap-sikap inilah yang kemudian dikenal dengan nama kultur hukum.

Dalam hal nilai-nilai hukum dan sikap-sikap anti korupsi dimaksud adalah agar setiap warga masyarakat tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan yang cenderung korupsi dan merugikan pihak lain, seperti : tidak mau menerima dan memberi suap sebagai jalan pintas dalam mengurus suatu keperluan, melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya praktek suap atau korupsi dalam segala bentuk, seperti dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kerugian uang negara,
- b. Suap-menyuap,
- c. Penggelapan dalam jabatan,
- d. Pemerasan,
- e. Perbuatan curang,
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- g. Gratifikasi.

Penutup

Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan tokoh masyarakat serta dorongan dari masyarakat akan sadar korupsi harus benar-benar ditingkatkan, termasuk kerjasama dari KPK dengan selalu memberikan penyuluhan bersama tokoh masyarakat, karena karena tokoh masyarakat ini merupakan ujung tombak penting untuk menggerakkan system masyarakat sadar korupsi.

Sebagai saran, KPK bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan adat dalam pembentukan aturan dalam masyarakat, misalnya awig-awig dalam masyarakat adat Bali. Dengan adanya

awig-awig yang mengatur tentang korupsi setindak menjadi landasan dalam penegakan anti-korupsi ini sendiri yang dimulai tingkat kelompok masyarakat adat.